



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI
MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA
MILIK NEGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochamad Edy Yusuf

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang
Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Ferry Irawan

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan
Usaha Milik Negara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelola dan
Pengembangan Usaha Badan Usaha
Milik Negara



Ferry Irawan

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Badan
Usaha Milik Negara Bidang Industri
Manufaktur, Agro, Farmasi, dan
Kesehatan



Mochamad Edy Yusuf

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI
MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Rp 16,56 T
		1.2 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	80%
2	Terjaganya Tingkat Inflasi di Kisaran Sasaran	2.1 Tingkat Inflasi	2,5% ±1%
3	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal	3.1 Persentase Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Terlaksana	80%
4	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN di Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas	4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN	80%
		4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN	80%
		4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu	80%
		4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga	80%
		4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal	80%
		4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi	80%
5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Baik (3 dari 4)
6	Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan

Total

(Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 1.844.080.000,-

Rp. 1.844.080.000,-

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelola dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara



Ferry Irawan

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan



Mochamad Edy Yusuf

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG
INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Rp 16,56 Triliun	Optimalisasi realisasi Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi rencana belanja modal dan identifikasi isu strategis yang menghambat <i>capex</i> BUMN bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan • Koordinasi persiapan modernisasi pabrik gula di bawah SugarCo • Koordinasi persiapan percepatan pembangunan pabrik mobil nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pencapaian belanja modal BUMN bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Triwulan I Tahun 2026 • Koordinasi progres modernisasi pabrik gula di bawah SugarCo • Koordinasi progres percepatan pembangunan pabrik mobil nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pencapaian belanja modal BUMN bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Semester I • Koordinasi utilitas modernisasi pabrik gula di bawah SugarCo • Koordinasi utilitas percepatan pembangunan pabrik mobil nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pencapaian belanja modal BUMN bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Tahun 2026 • Monitoring tingkat utilitas belanja modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Tahun 2026 • Pemetaan strategi efektivitas modernisasi pabrik gula di bawah SugarCo tahun berikutnya • Pemetaan strategi efektivitas percepatan penyelesaian pembangunan pabrik mobil nasional tahun berikutnya
		1.2 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	80%	Pengawasan Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi bersama BUMN sektor agro terkait langkah konkret kebijakan percepatan swasembada gula • Inventarisasi program dan rencana kerja BUMN Agro terkait swasembada gula 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi data progres kebijakan percepatan swasembada gula oleh BUMN Agro • Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi capaian target giling dan pasokan gula untuk kebutuhan sampai akhir tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi capaian target swasembada gula 2026 dan rencana aksi 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2	Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran	2.1 Tingkat Inflasi	2,5% ±1%	Tersusunnya rekomendasi arahan, kebijakan dan program kerja pengendalian Inflasi tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan program kerja TPIP melalui strategi 4K dalam pengendalian inflasi 2026 Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW IV 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026 melalui strategi 4K Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW I 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026 melalui strategi 4K Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW II 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026 melalui strategi 4K Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi 2026 dan intervensi pemerintah TW III 2026
3	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal	3.1 Persentase Kebijakan stimulus ekonomi yang terlaksana	80%	Tersusunnya rekomendasi kebijakan stimulus yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tw I FGD dengan Ekonom terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kegiatan <i>Policy Outreach Forum</i>: Kebijakan Ekonomi Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas SDM Muda Unggul 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tw II FGD dengan Ekonom terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kegiatan <i>Policy Outreach Forum</i>: Kebijakan Ekonomi Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas SDM Muda Unggul 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tw III FGD dengan Ekonom terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kegiatan <i>Policy Outreach Forum</i>: Kebijakan Ekonomi Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas SDM Muda Unggul 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tw IV FGD dengan Ekonom terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kegiatan <i>Policy Outreach Forum</i>: Kebijakan Ekonomi Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas SDM Muda Unggul
4	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas	4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN	80%	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan daya saing industri Bahan Baku Obat (BBO) melalui BUMN Penguatan BUMN Sektor Farmasi dan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi permasalahan kebijakan Pengembangan Bahan Baku Obat 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Bahan Baku Obat Penguatan BUMN di Wisata Medis Koordinasi kebijakan GERMAS bersama Bappenas dan lintas K/L 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi formulasi kebijakan Pengembangan Bahan Baku Obat Kunjungan strategis ke pabrik fitofarmaka dalam rangka memperkuat rantai nilai farmasi berbasis sumber daya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengembangan Bahan Baku Obat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN	80%	Penguatan industri baja, otomotif, dan semikonduktor melalui BUMN	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan inventarisasi kebijakan, program, dan penugasan strategis BUMN pada sektor industri baja, otomotif, dan semikonduktor 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi awal untuk penyalarsan arah kebijakan penguatan industri manufaktur prioritas serta keterkaitan hulu–hilir antara industri baja, otomotif, dan semikonduktor Penyusunan alternatif pelaksanaan program strategis BUMN pada sektor industri baja, otomotif, dan semikonduktor Penyusunan alternatif rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi implementasi kebijakan penguatan industri manufaktur prioritas oleh BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan pelaksanaan program strategis BUMN dalam penguatan industri baja, otomotif, dan semikonduktor, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dan rantai pasok 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penguatan industri baja, otomotif, dan semikonduktor oleh BUMN sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengendalian program tahun berikutnya
		4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu	80%	Percepatan perluasan lahan tebu dari konversi lahan HGU PTPN II dan lahan non-HGU	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi permasalahan kebijakan perluasan lahan tebu dari konversi lahan HGU PTPN II dan lahan non-HGU. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif atas rekomendasi optimalisasi penggunaan lahan eksisting PTPN III untuk percepatan kebijakan perluasan lahan tebu. Penyusunan alternatif rekomendasi atas pemetaan potensi lahan untuk percepatan perluasan lahan tebu dari lahan non-HGU PTPN III. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi formulasi kebijakan terkait optimalisasi penggunaan lahan eksisting PTPN III untuk percepatan kebijakan perluasan lahan tebu. Koordinasi formulasi kebijakan terkait percepatan perluasan lahan tebu dari lahan non-HGU PTPN III. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi kebijakan optimalisasi penggunaan lahan eksisting PTPN III untuk percepatan kebijakan perluasan lahan tebu. Monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan perluasan lahan tebu dari lahan non-HGU PTPN III.
		4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	80%	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya forum-forum koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/High Level Meeting TPIP Pelaksanaan proses evaluasi kinerja TPID 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan kriteria evaluasi kinerja TPID tahun 2026 Penyampaian surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		n Kebijakan terkait Stabilitas Harga		Permenko Perekonomian No 10/2017 <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya evaluasi kinerja TPID 2025 (TPID Award 2026) • Pembinaan TPID 	tahun 2025 (TPID Award 2026) <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026 • Capacity Building TPID • Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Inflasi Bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proses evaluasi kinerja TPID tahun 2025 (TPID Award 2026) • Penetapan hasil evaluasi kinerja melalui Kepmenko Perekonomian • Capacity Building TPID • Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Inflasi Bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian usulan penerima Insentif Fiskal kategori Pengendalian Inflasi (TPID Award 2026) kepada Kementerian Keuangan • Capacity Building TPID • Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Inflasi Bulanan • Monitoring dan evaluasi program unggulan TPID <i>Champion</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • TPIP terkait persiapan HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2026 • Capacity Building TPID • Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Inflasi Bulanan • Monitoring dan evaluasi program unggulan TPID <i>Champion</i>
		4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal	80%	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait sektor eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal • Monitoring implementasi kebijakan DHE SDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal • Pelaksanaan Koordinasi <i>Working Group (WG) Tarif dan Market Access</i> pada Perundingan Perdagangan Internasional • Monitoring dampak kebijakan Tarif Baru AS • Monitoring pengembangan sistem pengembangan terintegrasi DHE SDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal • Pelaksanaan Koordinasi <i>Working Group (WG) Tarif dan Market Access</i> pada Perundingan Perdagangan Internasional • Monitoring pengembangan sistem pengembangan terintegrasi DHE SDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal • Monitoring implementasi sistem pengembangan terintegrasi DHE SDA • Evaluasi Implementasi LCT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi	80%	Monitoring dan Evaluasi Program Stimulus Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait program stimulus ekonomi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Tw I Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program stimulus ekonomi Tw I 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait program stimulus ekonomi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Tw II Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program stimulus ekonomi TW II 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait program stimulus ekonomi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Tw III Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program stimulus ekonomi TW III 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait program stimulus ekonomi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Tw IV Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program stimulus ekonomi Tw IV
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Baik (3 dari 4)	Kolaborasi dan Sinergitas dengan Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil survei Semester II-2025 Persiapan survei kepuasan layanan Semester I-2026 Penguatan <i>engagement</i> dengan <i>stakeholder</i> (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan baik formal maupun informal) Penyampaian Data dan Informasi Pengendalian Inflasi kepada pihak eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester I 2026 Penguatan <i>engagement</i> dengan <i>stakeholder</i> (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan baik formal maupun informal) Penyampaian Data dan Informasi Pengendalian Inflasi kepada pihak eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil survei Semester I 2026 dan persiapan survei Semester II 2026 Penguatan <i>engagement</i> dengan <i>stakeholder</i> (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan baik formal maupun informal) Penyampaian Data dan Informasi Pengendalian Inflasi kepada pihak eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester II 2026 Penguatan <i>engagement</i> dengan <i>stakeholder</i> (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan baik formal maupun informal) Penyampaian Data dan Informasi Pengendalian Inflasi kepada pihak eksternal
6	Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang	92%	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan Renja 2026 Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan Revisi Renja 2026 Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja Penyusunan matriks manajemen risiko Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026 Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan		<ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat Maturitas SPIP ● Nilai SAKIP ● Indeks Perencanaan Pembangunan ● Tingkat Digitalisasi Arsip 				

Jakarta, 30 Januari 2026

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik
Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan
Kesehatan

Mochamad Edy Yusuf

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 1.1

Sasaran Kegiatan : SK 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU Nomor 19 tahun 2003). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBPN maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peran strategisnya, BUMN juga didorong untuk merealisasikan investasi melalui belanja modal yang produktif, khususnya pada sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan. Belanja modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong substitusi impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri.

Pengembangan Usaha BUMN merupakan upaya pengelolaan BUMN melalui pengembangan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, peningkatan sinergi antar BUMN, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan negara.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan penambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan *output* dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, belanja modal BUMN di sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan berperan sebagai pendorong investasi yang mendukung peningkatan kapasitas produksi, daya saing industri, dan transformasi ekonomi nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Deskripsi IKU : **Definisi**

Belanja modal (*capital expenditure/capex*) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi *capex* mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (*capex*) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan sehingga target persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar 60% berdasarkan *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.

BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, dan BUMN yang menerima PMN di tahun 2024 (sesuai UU nomor 19 tahun 2003). Rincian BUMN yang dikoordinasikan antara lain:

- PT Perkebunan Nusantara III / PTPN III (holding perkebunan) dengan target tahun 2026 **Rp 13,25 T**
- PT Biofarma (holding farmasi) dengan target tahun 2026 **Rp1,13 T**
- PT Biro Klasifikasi Indonesia / BKI (holding SURVEY ID) dengan target tahun 2026 **Rp0,73 T**
- PT LEN Industri (holding DEFEND ID) dengan target tahun 2026 **Rp1,45T**

Untuk mencapai target realisasi *capex*, BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan.

s.d. Triwulan II	Rp 6,64 Triliun	Rp 2,48 Triliun	Rp 6,64 Triliun	N/A
s.d. Triwulan III	Rp 10,1 Triliun	Rp 4,31 Triliun	Rp 10,1 Triliun	N/A
s.d. Triwulan IV	Rp 16,56 Triliun	Rp 14,62 Triliun	Rp 16,56 Triliun	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 1.2

Sasaran Kegiatan : SK 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Deskripsi Sasaran Kegiatan :

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU Nomor 19 Tahun 2003). BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap penerimaan negara, baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBPN, maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya, BUMN tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, menjalankan kegiatan usaha perintisan yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pelaku usaha kecil melalui program kemitraan.

Pengembangan usaha BUMN dilakukan melalui perluasan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, serta peningkatan sinergi antar-BUMN, guna memperkuat efisiensi dan daya saing sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, adaptif, dan produktif, khususnya di sektor-sektor strategis yang mendukung agenda pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi penambahan pendapatan nasional atau output dalam periode tertentu, yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator-indikator utama seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, peran BUMN sangat strategis sebagai instrumen negara dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Selaras dengan peran tersebut, BUMN juga menerima penugasan dari pemerintah untuk menjalankan berbagai program strategis nasional, khususnya di bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan. Penugasan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sektor-sektor vital, serta mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang belum dapat sepenuhnya dijalankan oleh swasta. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penugasan ini, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemantauan yang intensif oleh Kemenko Perekonomian agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 1.2 Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Deskripsi IKU :

Definisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan. Dalam hal ini, penekanan khusus diberikan pada percepatan penyelesaian penugasan kepada PTPN III (Persero) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mencapai swasembada gula nasional serta mendukung penyediaan Bioethanol sebagai bahan bakar nabati.

Penugasan pemerintah kepada PTPN III (Persero) yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:

- Perluasan lahan tebu, dengan target 2026 sebesar **200.046 ha**
- Peningkatan produksi gula, dengan target 2026 sebesar **1,07 juta ton**
- Peningkatan rendemen gula, dengan target 2026 sebesar **7,35%**.

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian energi melalui optimalisasi produksi gula dan bioethanol. Jika target ini tercapai, dampaknya tidak hanya pada sektor pertanian dan energi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan.

Target penugasan dikatakan tercapai apabila mencapai 80% dari target tahun 2026.

Formula

Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan dihitung dengan.

Realisasi IKU 1.2

$$\text{Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Tujuan

Memastikan efektivitas dan efisiensi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN, khususnya dalam mencapai swasembada gula dan penyediaan bioethanol sebagai bahan bakar nabati. Dengan evaluasi yang terukur, pemerintah dapat memantau progres, mengidentifikasi tantangan, serta mengoptimalkan sumber daya guna meningkatkan produksi gula dan rendemen tebu sesuai target nasional. Selain itu, IKU juga berperan dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan daya saing industri nasional, dan mendukung ketahanan pangan serta energi secara berkelanjutan.

Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	:	BUMN dan BP BUMN
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Sumber Data	:	Laporan Keuangan Triwulan/Tahunan BUMN, Kajian, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi dan lain-lain
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	80%	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	41,64%	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	51,88%	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	81,13%	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	94,61%	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO,
FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 2.1

Sasaran Kegiatan	: SK 2. Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran							
Deskripsi Sasaran Kegiatan	: <p>Upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui terwujudnya kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan merealisasikan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Tingkat inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tingkat inflasi diukur berdasarkan perubahan atas Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. Realisasi tingkat inflasi bulanan dan tahunan diukur dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan sasaran Inflasi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.</p> <p>Tercapainya realisasi indikator-indikator makro ekonomi dan keuangan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah, terutama tingkat inflasi, merupakan salah satu hasil dari rekomendasi Kebijakan Pengendalian inflasi yang disusun dan merupakan pengejawantahan dari tugas Asisten Deputi Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Wakil Kepala Sekretariat TPIP berdasarkan Permenko No. 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pengejawantahan atas Keputusan Menko Perekonomian No. 313 Tahun No. 2023 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional).</p> <p>Secara umum tingkat inflasi di Indonesia terus mengalami tren penurunan dan berada dalam kisaran sasarannya. Tren penurunan inflasi terjadi pada seluruh disagregasinya, baik kelompok inti, <i>administered prices</i> (AP), maupun <i>volatile foods</i> (VF). Demikian pula secara spasial, pencapaian inflasi di sebagian besar daerah juga tercatat berada pada level yang rendah. Pemerintah bersama Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi yang rendah dengan tren menurun dan sesuai dengan tingkat inflasi yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan.</p>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: 2.1 Tingkat Inflasi							
Deskripsi IKU	: <table border="1"><tr><td>Definisi</td></tr><tr><td>Inflasi adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Data inflasi sangat mempengaruhi pengambilan berbagai kebijakan nasional. Inflasi menjadi salah satu indikator asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Di tingkat nasional pemanfaatan data inflasi/deflasi diantaranya sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak, yang pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.</td></tr><tr><td>Tingkat inflasi nasional yang terjaga dalam kisaran sasaran mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bahwa upaya pengendalian inflasi/stabilisasi harga berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, dimana pengeluaran tertinggi masyarakat miskin adalah untuk bahan pangan. Pada tahun 2026 sasaran inflasi ditetapkan sebesar $2,5\% \pm 1\%$ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.</td></tr><tr><td>Dalam rangka memastikan pencapaian target inflasi di kisaran sasaran, dibutuhkan komitmen penuh dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara optimal. Upaya dan komitmen tersebut dituangkan dalam program kerja TPIP dalam strategi utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.</td></tr><tr><td>Dalam pelaksanaan proker TPIP, Asisten Deputi Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan sebagai wakil kepala sekretariat TPIP berperan dalam mengkoordinasikan program kebijakan yang berkaitan pengendalian inflasi dari Kementerian/Lembaga anggota TPIP maupun stakeholder strategis lainnya serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengendalian inflasi TPIP berjalan dengan efektif. Besaran Persentase inflasi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2026 adalah: $2,5\% \pm 1\%$</td></tr><tr><td>Formula</td></tr><tr><td>IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</td></tr></table>	Definisi	Inflasi adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Data inflasi sangat mempengaruhi pengambilan berbagai kebijakan nasional. Inflasi menjadi salah satu indikator asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Di tingkat nasional pemanfaatan data inflasi/deflasi diantaranya sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak, yang pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.	Tingkat inflasi nasional yang terjaga dalam kisaran sasaran mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bahwa upaya pengendalian inflasi/stabilisasi harga berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, dimana pengeluaran tertinggi masyarakat miskin adalah untuk bahan pangan. Pada tahun 2026 sasaran inflasi ditetapkan sebesar $2,5\% \pm 1\%$ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.	Dalam rangka memastikan pencapaian target inflasi di kisaran sasaran, dibutuhkan komitmen penuh dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara optimal. Upaya dan komitmen tersebut dituangkan dalam program kerja TPIP dalam strategi utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.	Dalam pelaksanaan proker TPIP, Asisten Deputi Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan sebagai wakil kepala sekretariat TPIP berperan dalam mengkoordinasikan program kebijakan yang berkaitan pengendalian inflasi dari Kementerian/Lembaga anggota TPIP maupun stakeholder strategis lainnya serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengendalian inflasi TPIP berjalan dengan efektif. Besaran Persentase inflasi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2026 adalah: $2,5\% \pm 1\%$	Formula	IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:
Definisi								
Inflasi adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Data inflasi sangat mempengaruhi pengambilan berbagai kebijakan nasional. Inflasi menjadi salah satu indikator asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Di tingkat nasional pemanfaatan data inflasi/deflasi diantaranya sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak, yang pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.								
Tingkat inflasi nasional yang terjaga dalam kisaran sasaran mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bahwa upaya pengendalian inflasi/stabilisasi harga berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, dimana pengeluaran tertinggi masyarakat miskin adalah untuk bahan pangan. Pada tahun 2026 sasaran inflasi ditetapkan sebesar $2,5\% \pm 1\%$ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.								
Dalam rangka memastikan pencapaian target inflasi di kisaran sasaran, dibutuhkan komitmen penuh dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara optimal. Upaya dan komitmen tersebut dituangkan dalam program kerja TPIP dalam strategi utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.								
Dalam pelaksanaan proker TPIP, Asisten Deputi Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan sebagai wakil kepala sekretariat TPIP berperan dalam mengkoordinasikan program kebijakan yang berkaitan pengendalian inflasi dari Kementerian/Lembaga anggota TPIP maupun stakeholder strategis lainnya serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengendalian inflasi TPIP berjalan dengan efektif. Besaran Persentase inflasi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2026 adalah: $2,5\% \pm 1\%$								
Formula								
IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:								

<p>Tingkat Inflasi = $\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan: IHK_t: IHK periode ini IHK_{t-1} = IHK periode sebelumnya</p>
Tujuan
Mengukur tingkat efektivitas pengendalian inflasi nasional dengan cara memantau apakah realisasi inflasi berada dalam kisaran target 1,5%–3,5%, serta seberapa dekat capaian tersebut terhadap sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Satuan Pengukuran	: Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	: Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Pejabat Penanggung Jawab Data	: Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Sumber Data	: Data internal, Berita Resmi Statistik BPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Bloomberg, dan data dari instansi/lembaga lain yang terkait.
Tingkat Kendali IKU	: <input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	: <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	: <input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect
Polarisasi IKU	: <input type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input checked="" type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	2,5% ± 1%	2,92%	2,5% ± 1%	N/A
s.d. Triwulan I	2,5% ± 1%	1,03%	2,5% ± 1%	N/A
s.d. Triwulan II	2,5% ± 1%	1,87%	2,5% ± 1%	N/A
s.d. Triwulan III	2,5% ± 1%	2,65%	2,5% ± 1%	N/A
s.d. Triwulan IV	2,5% ± 1%	2,92%	2,5% ± 1%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO,
FARMASI, DAN KESEHATAN**

KODE IKU: 3.1

Sasaran Kegiatan : SK 3. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal

Deskripsi Sasaran Kegiatan :

Upaya pemerintah dalam memperkuat daya beli dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai program stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Penguatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu prioritas dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang.

Stimulus ekonomi diberikan dalam berbagai bentuk, baik fiskal maupun non-fiskal, yang dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat, meningkatkan produktivitas sektor riil, serta memperluas akses ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan. Program stimulus ini mencakup bantuan sosial, insentif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), subsidi strategis, serta berbagai kebijakan kemudahan akses permodalan dan pembiayaan.

Pelaksanaan program stimulus ekonomi masyarakat merupakan bentuk koordinasi lintas kementerian/lembaga yang melibatkan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memastikan sinkronisasi dan efektivitas kebijakan. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa stimulus yang diberikan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak multiplikasi yang optimal bagi perekonomian.

Keberhasilan program stimulus diukur melalui berbagai indikator, antara lain peningkatan daya beli masyarakat, pertumbuhan sektor UMKM, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan konsumsi rumah tangga. Melalui stimulus yang terukur dan berkelanjutan, diharapkan fondasi ekonomi masyarakat semakin kuat, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 3.1 Persentase Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Terlaksana

Deskripsi IKU :

Definisi

Persentase Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Terlaksana adalah ukuran untuk menilai efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai program stimulus ekonomi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tepat waktu, akurat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan.

IKU ini mengukur berbagai dimensi kualitas monitoring dan evaluasi, antara lain: (1) ketepatan waktu pelaporan dan pemantauan, (2) akurasi dan validitas data yang dikumpulkan, (3) cakupan dan kedalaman analisis terhadap dampak program, (4) kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, serta (5) tingkat responsivitas dalam menindaklanjuti temuan evaluasi. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) dan verifikasi oleh tim independen terhadap dokumen monitoring, laporan evaluasi, serta implementasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi yang membidangi stimulus ekonomi berperan dalam mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga pelaksana program stimulus, melakukan analisis capaian dan dampak program, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Koordinasi lintas K/L diperlukan untuk memastikan data dan informasi yang komprehensif dapat dikumpulkan dan dianalisis secara holistik.

Formula

IKU Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dihitung dengan pembobotan beberapa indikator, di antaranya ketepatan waktu, akurasi data, dan analisis dampak. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Realisasi IKU 3.1 = (Skor Ketepatan Waktu × 20%) + (Skor Akurasi Data × 25%) + (Skor Analisis Dampak × 25%) + (Skor Kualitas Rekomendasi × 20%) + (Skor Responsivitas Tindak Lanjut × 10%)

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program stimulus ekonomi, sehingga dapat memastikan bahwa stimulus yang diberikan tepat sasaran, memberikan dampak optimal bagi penguatan ekonomi masyarakat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Sumber Data	:	Data internal, Berita Resmi Statistik BPS, Bloomberg, dan data dari instansi/lembaga lain yang terkait.
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	:	(...) Maximize (...) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	80%	N/A
s.d. Triwulan II	80%	N/A
s.d. Triwulan III	80%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG
INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 4.1

Sasaran Kegiatan : SK 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan berperan penting dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang:
 - Pengembangan BUMN di sektor Industri Manufaktur
 - Pengembangan BUMN di sektor Agro
 - Pengembangan BUMN di sektor Farmasi, dan Kesehatan
 - Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi,
 - Ekspor,
 - Ketahanan sektor eksternal,
 - Fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional,
 - Stabilitas harga,
 - Efisiensi penugasan pemerintah dan
 - Rasio BUMN dengan kategori sehat;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Sasaran Kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif *internal business process* yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif *stakeholder*, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN

Deskripsi IKU : **Definisi**
Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN yaitu:

- Sinkronisasi *roadmap* dan target kemandirian BBO nasional melalui forum koordinasi *antar-K/L* dan BUMN
- Penguatan peran Holding BUMN Farmasi (Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma) dalam pengembangan dan investasi BBO strategis;
- Fasilitasi percepatan proyek produksi BBO di dalam negeri, seperti operasionalisasi pabrik BBO PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) dan perluasan kapasitas produksi BBO;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi capaian produksi, efisiensi rantai pasok, dan utilisasi kapasitas industri BBO milik BUMN;
- Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas di luar poin di atas, sebagai tindak lanjut arahan presiden atau menteri pada tahun berjalan (*ad hoc*).

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L

terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Formula

- 1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama**

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$
- 2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua**

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$
- 3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga**

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$
- 4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat**

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$
- 5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN.

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Sumber Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Tingkat Kendali IKU	:	(X) High (...) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 4.2

Sasaran Kegiatan : SK 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan berperan penting dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang:
 - Pengembangan BUMN di sektor Industri Manufaktur
 - Pengembangan BUMN di sektor Agro
 - Pengembangan BUMN di sektor Farmasi, dan Kesehatan
 - Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi,
 - Ekspor,
 - Ketahanan sektor eksternal,
 - Fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional,
 - Stabilitas harga,
 - Efisiensi penugasan pemerintah dan
 - Rasio BUMN dengan kategori sehat;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Sasaran Kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif *internal business process* yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif *stakeholder*, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN

Deskripsi IKU : **Definisi**
Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait industri baja, otomotif, dan semikonduktor oleh BUMN. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Industri baja merupakan sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan infrastruktur, industri manufaktur, alat berat, pertahanan, dan sektor konstruksi nasional. Dalam konteks ini, kebijakan industri baja diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri hulu dan antara, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan daya saing produk baja nasional. Seiring dengan perkembangan struktur industri dan agenda prioritas pemerintah, kebijakan tersebut juga disinergikan dengan penguatan sektor otomotif dan semikonduktor sebagai bagian dari upaya memperdalam rantai nilai industri manufaktur

nasional. Pengembangan industri otomotif, termasuk penugasan strategis BUMN dalam proyek mobil nasional, membutuhkan dukungan baja berkualitas tinggi serta ekosistem semikonduktor yang andal untuk komponen elektronik dan sistem kendali. Oleh karena itu, efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan oleh BUMN pada sektor industri baja, otomotif, dan semikonduktor menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan rantai pasok, meningkatkan nilai tambah domestik, serta mendorong daya saing industri nasional secara berkelanjutan. Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN, yaitu:

- Sinkronisasi kebijakan pengembangan industri baja nasional yang melibatkan BUMN strategis seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak usahanya, guna memastikan ketersediaan baja hulu dan antara yang mendukung industri manufaktur prioritas;
- Pemantauan dan koordinasi atas proses restrukturisasi dan transformasi bisnis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk mendukung peningkatan efisiensi operasional, perbaikan kinerja keuangan, serta optimalisasi kapasitas produksi baja nasional;
- Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri baja nasional, termasuk pengembangan klaster baja hulu dan baja hilir bernilai tambah yang terintegrasi dengan kebutuhan industri otomotif dan manufaktur strategis lainnya;
- Sinkronisasi kebijakan pengembangan industri otomotif nasional, khususnya penugasan strategis PT Pindad sebagai pelaksana proyek mobil nasional, melalui koordinasi lintas K/L dan BUMN guna memastikan keterpaduan desain produk, kesiapan rantai pasok, serta pemanfaatan komponen dalam negeri, termasuk baja dan komponen manufaktur lokal;
- Koordinasi pengendalian kebijakan pengembangan industri semikonduktor nasional oleh BUMN, khususnya PT Len Industri, sebagai respon atas dinamika global rantai pasok semikonduktor dan kebutuhan penguatan kemandirian teknologi nasional, terutama untuk sektor pertahanan, otomotif, dan industri strategis lainnya;
- Sinkronisasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong keterhubungan (linkage) antara industri baja, otomotif, dan semikonduktor, termasuk melalui pemanfaatan instrumen P3DN, dukungan kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta penyiapan proyek percontohan (pilot project) yang melibatkan BUMN strategis;
- Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi terpadu atas implementasi kebijakan industri prioritas oleh BUMN, guna memastikan keselarasan antara arah kebijakan pemerintah, strategi korporasi BUMN, dan perkembangan teknologi serta pasar global.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan industri baja, otomotif, dan semikonduktor (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program

- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan industri baja, otomotif, dan semikonduktor (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait industri baja, otomotif, dan semikonduktor (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan industri baja, otomotif, dan semikonduktor (1 paket dokumen).

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan industri baja, otomotif, dan semikonduktor oleh BUMN

% efektivitas SKP

*= Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua
+ Nilai Tahapan ketiga + Nilai Tahapan keempat*

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan industri baja, otomotif, dan semikonduktor oleh BUMN.

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Sumber Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Tingkat Kendali IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> High (...) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize (....) Minimize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE IKU: 4.3

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

Sasaran Kegiatan : SK 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan berperan penting dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang:
 - Pengembangan BUMN di sektor Industri Manufaktur
 - Pengembangan BUMN di sektor Agro
 - Pengembangan BUMN di sektor Farmasi, dan Kesehatan
 - Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi,
 - Ekspor,
 - Ketahanan sektor eksternal,
 - Fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional,
 - Stabilitas harga,
 - Efisiensi penugasan pemerintah dan
 - Rasio BUMN dengan kategori sehat;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Sasaran Kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif *internal business process* yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif *stakeholder*, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu

Deskripsi IKU : **Definisi**
Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait peningkatan sumber bahan baku berbasis tebu merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana proses perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan lintas sektor dilakukan secara terkoordinasi dan selaras dalam mendukung ketersediaan bahan baku tebu nasional.

Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari proses tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait, serta tercermin dalam dukungan nyata terhadap program peningkatan produksi dan/atau penyerapan bahan baku tebu dalam negeri.

Hasil dari proses ini selanjutnya dievaluasi melalui penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala, yang mencakup capaian implementasi kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan langkah korektif untuk optimalisasi kebijakan..

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu, yaitu:

- **Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Penyediaan Bahan Baku Etanol Berbasis Tebu oleh PTPN III** melalui koordinasi lintas pihak, dilakukan identifikasi tantangan serta penyusunan langkah percepatan penyediaan bahan baku tebu untuk etanol di lahan milik PTPN III.
- **Identifikasi dan Pemetaan Potensi Lahan (HGU dan non-HGU)**. Upaya ini dilakukan untuk merumuskan rekomendasi pemanfaatan lahan secara optimal bagi pengembangan tebu, termasuk lahan eksisting dan non-HGU yang strategis.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Eksisting**. Dilakukan monitoring terhadap penggunaan lahan eksisting PTPN III untuk memastikan dukungan terhadap produksi bahan baku etanol berbasis tebu yang berkelanjutan.
- **Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan**. Koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan tata guna lahan, pengelolaan HGU, serta dukungan fiskal atau teknis terhadap program peningkatan produksi tebu nasional.
- **Evaluasi Kebijakan Tahunan**. Evaluasi akhir tahun dilaksanakan untuk mengkaji capaian, hambatan, serta rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan kebijakan penyediaan bahan baku tebu oleh PTPN III, yang hasilnya menjadi bagian dari indikator efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,

- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu

% efektivitas SKP

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan percepatan penyediaan sumber bahan baku berbasis tebu, khususnya dalam mendukung program pengembangan bioenergi nasional (bahan baku etanol).

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Sumber Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Tingkat Kendali IKU	:	(X) High (...) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 4.4

Sasaran Kegiatan : SK 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan berperan penting dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang:
 - Pengembangan BUMN di sektor Industri Manufaktur
 - Pengembangan BUMN di sektor Agro
 - Pengembangan BUMN di sektor Farmasi, dan Kesehatan
 - Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi,
 - Ekspor,
 - Ketahanan sektor eksternal,
 - Fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional,
 - Stabilitas harga,
 - Efisiensi penugasan pemerintah dan
 - Rasio BUMN dengan kategori sehat;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Sasaran Kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif *internal business process* yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif *stakeholder*, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga

Deskripsi IKU : **Definisi**
Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait stabilitas harga merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan lintas sektor dirumuskan dan dilaksanakan secara terkoordinasi dalam rangka menjaga stabilitas harga, khususnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional. Proses ini mencakup keselarasan antar pemangku kepentingan dalam merespons dinamika harga komoditas strategis agar tidak menimbulkan tekanan terhadap inflasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga, yaitu:

- Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Inflasi.**
Pemerintah secara berkelanjutan menyelenggarakan forum koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik melalui pertemuan reguler maupun forum strategis seperti Rakornas dan Rakorpusda. Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan,

memperkuat peran TPID, serta memastikan pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Permenko Perekonomian No. 10/2017. Koordinasi ini juga mencakup penyusunan strategi jangka pendek dan menengah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan strategis.

- **Evaluasi Kinerja Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga.** Untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kinerja daerah, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pengendalian inflasi daerah melalui mekanisme penilaian TPID Award. Evaluasi ini tidak hanya menilai pencapaian output, tetapi juga proses koordinasi, inovasi kebijakan, dan sinergi lintas sektor di daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan lanjutan dan sebagai referensi dalam pemberian penghargaan atau insentif kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga kestabilan harga secara efektif.
- **Penguatan Kapasitas TPID melalui Kegiatan Capacity Building.** Peningkatan kualitas kebijakan pengendalian inflasi turut didorong melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan TPID. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman daerah terhadap dinamika inflasi, pengelolaan pasokan dan distribusi, serta penggunaan instrumen kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Melalui penguatan kelembagaan ini, TPID diharapkan mampu merespons gejala harga secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan daerah yang mendukung stabilitas harga nasional.
- **Koordinasi Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).** Dalam mengantisipasi tekanan inflasi musiman selama periode Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, dilakukan koordinasi intensif dengan TPID dan kementerian/lembaga terkait. Langkah ini diimplementasikan melalui penyampaian surat imbauan, monitoring stok dan distribusi pangan, serta penyiapan intervensi kebijakan jika diperlukan. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan usulan penerima insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang mampu menjaga stabilitas harga selama periode tersebut.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga

% efektivitas SKP

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait stabilitas harga

Satuan Pengukuran

:

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Sumber Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
Tingkat Kendali IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> High (...) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (....) Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Polarisasi IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize (....) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO,
FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 3.6

Sasaran Kegiatan : SK 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan berperan penting dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang;
 - Pengembangan BUMN di sektor Industri Manufaktur
 - Pengembangan BUMN di sektor Agro
 - Pengembangan BUMN di sektor Farmasi, dan Kesehatan
 - Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi,
 - Ekspor,
 - Ketahanan sektor eksternal,
 - Fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional,
 - Stabilitas harga,
 - Efisiensi penugasan pemerintah dan
 - Rasio BUMN dengan kategori sehat;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Sasaran Kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif *internal business process* yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif *stakeholder*, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 3.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi

Deskripsi IKU : **Definisi**
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi adalah ukuran untuk menilai efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai program stimulus ekonomi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tepat waktu, akurat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan.

Indeks ini mengukur berbagai dimensi kualitas monitoring dan evaluasi, antara lain: (1) ketepatan waktu pelaporan dan pemantauan, (2) akurasi dan validitas data yang dikumpulkan, (3) cakupan dan kedalaman analisis terhadap dampak program, (4) kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, serta (5) tingkat responsivitas dalam menindaklanjuti temuan evaluasi. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) dan verifikasi oleh tim independen terhadap dokumen monitoring, laporan evaluasi, serta implementasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi yang membidangi stimulus ekonomi berperan dalam mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga pelaksana program stimulus, melakukan analisis capaian dan dampak program, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Koordinasi lintas K/L diperlukan untuk memastikan data dan informasi yang komprehensif dapat dikumpulkan dan dianalisis secara holistik. Adapun beberapa daftar stimulus yang dikoordinasikan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan antara lain:

Metode Cascading : Direct Indirect

Polarisasi IKU : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE IKU: 5.1

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

Sasaran Kegiatan

SK.5 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang berkualitas merupakan Sasaran Kegiatan perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya Sasaran Kegiatan perspektif *stakeholder*. Sasaran Kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang mencakup melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ekspor, ketahanan sektor eksternal, fungsi mata uang lokal untuk transaksi internasional, stabilitas harga, efisiensi penugasan pemerintah dan rasio badan usaha milik negara dengan kategori sehat.

Sasaran Kegiatan terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang berkualitas, selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya, juga merupakan Sasaran Kegiatan yang memiliki pengaruh pada ketercapaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas. Dengan kata lain, kebijakan pengembangan usaha pengelolaan dan pengembangan BUMN sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Deskripsi IKU

Definisi
<p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p>
Formula
<p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan melakukan survei pelayanan ke kementerian/lembaga/stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan keasdepan pengembangan BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Sumber Data

Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Tingkat Kendali IKU

High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU

Exact Proxy Activity

Jenis Konsolidasi Periode

Sum Average Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

Cascading Peta Cascading Non-Peta Non-Cascading

Metode Cascading

Direct Indirect

Polarisasi IKU

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	3 dari 4	3,84	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan I	-	-	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan II	3 dari 4	3,81	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan III	-	-	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan IV	3 dari 4	3,86	3 dari 4	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, AGRO, FARMASI, DAN KESEHATAN

KODE IKU: 6.1

Sasaran Kegiatan	:	SK.6. Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang Berkualitas				
Deskripsi Sasaran Kegiatan	:	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level ke deputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan				
Deskripsi IKU	:	<table border="1"><thead><tr><th>Definisi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan:<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai2. Tingkat Maturitas SPIP3. Nilai SAKIP4. Indeks Perencanaan Pembangunan5. Tingkat Digitalisasi Arsip</td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan :</td></tr></tbody></table>	Definisi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan: <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai2. Tingkat Maturitas SPIP3. Nilai SAKIP4. Indeks Perencanaan Pembangunan5. Tingkat Digitalisasi Arsip	Formula	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan :
Definisi						
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan: <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai2. Tingkat Maturitas SPIP3. Nilai SAKIP4. Indeks Perencanaan Pembangunan5. Tingkat Digitalisasi Arsip						
Formula						
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan :						

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan

Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

- Satuan Pengukuran** :
- Unit/Pihak Penyedia Data** :
- Pejabat Penanggung Jawab Data** :
- Sumber Data** :
- Tingkat Kendali IKU** :
- Tingkat Validitas IKU** :
- Jenis Konsolidasi Periode** :
- Jenis Cascading IKU** :
- Metode Cascading** :
- Polarisasi IKU** :

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	85%	85%	85%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	20%	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	40%	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	60%	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	85%	85%	85%	N/A